



Inspektorat Kumpulkan Data Telusuri Oknum Pol. PP Lindungi Hotel Bodong

Singaraja (Bali Post) -

Inspektorat Buleleng tidak ingin membuang-buang waktu menyikapi tuduhan DPRD Buleleng terhadap oknum anggota Pol. PP yang melindungi hotel bodong di wilayah Kecamatan Gerokgak. Data terkait dugaan perilaku "nakal" anggota Pol. PP itu mulai dikumpulkan. Nantinya data awal itu dijadikan dasar setelah Bupati secara resmi menugaskan inspektorat menginvestigasi masalah ini.

Kepala Inspektorat I Putu Yasa ketika dihubungi Rabu (28/10) siang kemarin, mengatakan, data yang telah dikumpulkan itu setelah Ketua Komisi II DPRD Putu Mangku Budiasa membeberkan dugaan oknum anggota Pol. PP yang melindungi usaha hotel tanpa izin di Gerokgak. Sementara data atau keterangan lain masih dalam proses pengumpulan di lapangan. Data ini akan dijadikan bahan laporan kepada Bupati sekaligus memohon petunjuk lebih lanjut, untuk menuntaskan masalah ini. "Kalau secara resmi, kami memang belum diperintahkan melakukan investigasi. Akan tetapi data awal seperti disampaikan dewan sudah kami pegang. Data itu masih akan dilengkapi lagi. Begitu ada perintah, tinggal kami mengkaji

dan memohon petunjuk lebih lanjut," katanya.

Seluruh data maupun keterangan di lapangan kata Yasa, nantinya akan dipelajari Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah (Bapekda). Berdasarkan data dan kajian internal, Bapekda akan memutuskan apakah oknum anggota Pol. PP yang disebut-sebut melindungi hotel bodong itu terbukti bersalah atau tidak. Bapekda sendiri yang akan menjatuhkan sanksi jika oknum anggota Pol. PP itu dinyatakan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. "Apabila ada pelanggaran, wewenang menjatuhkan sanksi itu ada pada Bapekda. Saat ini, kami hanya menggali data untuk disampaikan kepada pimpinan daerah," tegasnya.

Informasi lain yang dihimpun

di lapangan menyebutkan pihak Badan Pol. PP dan Linmas belum memberikan klarifikasi terkait dugaan yang diberikan anggota dewan tersebut. Kepala Badan Pol. PP dan Linmas, Made Budi Astawa, juga belum bisa dikonfirmasi terkait keterlibatan oknum anak buahnya yang diduga melindungi hotel yang belum berizin tersebut. Budi dikabarkan masih melaksanakan tugas dinas ke luar kota. Bawahannya pun menolak memberikan keterangan ketika hendak dimintai konfirmasi terkait tuduhan dewan tersebut. Kapan Komisi I dan Komisi II DPRD memanggil Kepala Badan Pol. PP dan Linmas, Budi Astawa juga belum ada jadwal pasti. Alasannya, masih menunggu kedatangan Budi Astawa dari luar kota. (kmb38)

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 11



Langsung Ditahan Saat Pelimpahan

14 Tersangka SPPD Fiktif

Menangis

Gianyar (Bali Post) -

Setelah sempat beberapa kali ditunda, 14 tersangka dalam kasus SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, Rabu (28/10) kemarin. Saat pelimpahan tahap kedua itu, sejumlah tersangka terlihat menangis. Sebab, pada Rabu sore kemarin, ke-14 tersangka yang dulu bertugas di Dispenda Gianyar itu langsung ditahan di Rutan Kelas 2B Gianyar.

Berdasarkan pantauan, pukul 10.30 wita kemarin, rombongan dari Direskrimsus Polda Bali tiba di Kejari Gianyar bersama 14 tersangka SPPD fiktif. Mereka pun langsung menjalani proses pelimpahan dari Polda Bali ke Kejari Bali hingga akhirnya pelimpahan ke Kejari Gianyar hingga pukul 16.00 wita.

Usai proses tersebut, saat turun dari lantai dua para tersangka menutup wajah mereka

dari sorotan awak media, juga berlingung di balik punggung kerabat mereka. Sementara suara tangis juga terdengar dari tersangka perempuan, hingga mereka semua masuk bus tahanan untuk digiring ke Rutan Kelas 2B Gianyar.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan menjelaskan, penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sambil menunggu pembuatan dakwaan untuk selanjutnya



KORUPSI - Suasana saat para tersangka korupsi SPPD fiktif menyuarak di tengah kerumunan dengan menutup wajah saat digiring ke mobil tahanan menuju Rutan Kelas 2B Gianyar, Rabu (28/10) kemarin.

Bali Post/ink

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 9



SAMBUTAN - - -

proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa dari Kejati Bali yang akan menyidangkan perkara ini adalah Gede Arthana, Hari Soetopi dan Junaedi.

Keempat belas tersangka itu adalah Dewa Made Putra (Sekretaris Camat Tampaksiring), Ketut Ritama (Kepala Seksi Ketramtaman dan Ketertiban Kec. Ubud), Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi (staf Camat Tampaksiring), Ni Ketut Juni-antari (staf Dinas Perhubungan), I Ketut Puja (staf Camat Tegallalang), I Made Darmaja (staf Camat Gianyar), Komang Yastara (staf Camat Gianyar), I Made Wirawan (PNS Pemdams), I Nyoman Sulandra (staf Camat Ubud), Ni Wayan Suciastih (PNS Pemkab Gianyar), Ni Ketut Suniawati (staf Bagian Hukum Pemkab Gianyar), Ni

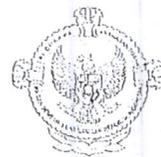
Made Ayu Purniasih (staf Pemkab Gianyar), A.A. Istri Agung Yunariawati (PNS Camat Gianyar) dan I Made Suparta (PNS Dinas Pendapatan Gianyar).

Kajari Gianyar Ketut Sumadana mengatakan, penahanan yang dilakukan kali ini terhadap 14 tersangka merupakan perintah Kejati Bali. Sebaliknya, Kejari Gianyar sebatas melaksanakan perintah, karena perannya lebih besar ada di Kejati Bali. "Tapi kalau kami, pertimbangan penahanannya jelas karena terbukti korupsi. Selain itu, karena kesulitan menghadirkan di persidangan, apalagi tersangka banyak. Kedua, supaya tidak ada saling memengaruhi karena satu sama lain tersangka," ucapnya.

Sumadana menegaskan, dari penahanan setiap tersangka, jajarannya juga ingin

menimbulkan efek jera. Mengenai penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum tersangka, mantan penyidik KPK ini menegaskan, pihaknya tidak menerima pengajuan penangguhan penahanan. Akan tapi, permohonan itu diajukan ke Kejati Bali. "Mereka ajukan penangguhan penahanan di Kejati Bali, ke Kejari Gianyar tidak ada. Karena saya hanya meneruskan. Kalau Kejati memutuskan tidak menahan, ya saya tidak tahan," ucapnya.

Kasus ini berawal dari perdin fiktif. Dalam SPPD menyebutkan, para tersangka ini akan studi banding ke pemerintah Depok. Namun kenyataannya, empat orang malah ke Thailand dan sisanya ke Jakarta dan Bogor. Akibatnya, negara dirugikan Rp 94 juta lebih. (kmb35/kmb37)



Proyek Puskesmas Abiansemal 1 Terancam Molor

Mangupura (Bali Post) -

Proyek pembangunan Puskesmas Abiansemal 1 terancam terkendala minimnya jumlah pekerja. Proyek yang menelan dana Rp 17.848.742.993 ini dikhawatirkan tidak dapat selesai sesuai jadwal alias molor. Proyek yang dikerjakan PT Asri Cipta Natha Alam ini ditarget selesai dalam 190 hari kalender, dari tanggal kontrak 17 Juni 2015. Namun berdasarkan pantauan di lapangan, Rabu (28/10) kemarin, progres pekerjaan baru pada tahap penembokan. Padahal target terakhir proyek harus kelar pada 23 Desember.

Terkait pengerjaan proyek tersebut, Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung Ni Putu Dessy Darmayanti menyata-

kan telah mengingatkan kepada rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek. "Setelah libur Lebaran memang progres

proyek mengecil. Memang masih di atas target, tetapi deviasinya sangat kecil. Makanya, kami mengingatkan rekanan agar

melakukan percepatan," ungkapnya.

Menurutnya, dari peninjauan yang telah dilakukan pada sejumlah kegiatan fisik, deviasi atau progresnya sangat kecil. Selain melakukan peninjauan ke proyek-proyek fisik, pihaknya juga memberikan arahan-arahan. "Agar pengerjaannya lebih cepat, kami minta rekanan me-

nambah tenaga kerja," ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya tidak berharap adanya proyek yang penyelesaiannya tidak sesuai jadwal, karena bisa merugikan rekanan itu sendiri. Sebab, mereka harus membayar denda atau penalti dari keterlambatan. "Sesuai ketentuan, jika terlambat maka akan dikenakan penalti," tegasas Dessy.

Sebelumnya, Bupati Badung yang kala itu dijabat A.A. Gde Agung sempat memarahi pimpinan proyek karena progres yang lamban. Bahkan, Gde Agung sempat meradang karena ditemukan tembok retak-retak. *Panglingsir* Puri Mengwi bahkan menegaskan jika proyek senilai Rp 17 miliar tersebut bukan proyek main-main. (kmb27)

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 3



Sidang Dugaan "Mark-Up" di BP3TKI

Kerugian

Rp 2,2 Miliar,

Rp 1,5 Miliar

Masih Misterius

Denpasar (Bali Post) -

Sidang kasus dugaan *mark-up* pengadaan lahan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) bidikan Mabes Polri, sepertinya mengundang misteri. Ini terjadi setelah pemeriksaan saksi termasuk saksi mahkota selesai, namun dana Rp 1,5 miliar dari kerugian negara mencapai Rp 2,2 miliar masih misterius. Misteriusnya dana yang menurut para saksi diserahkan ke Wahyu Matondang alias Dodik itu, juga diakui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, Edward Harris Sinaga.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (28/10) kemarin, jaksa menghadirkan ahli sekaligus langsung dilakukan pemeriksaan terdakwa I Wayan Pageh dan Prio. Yang menjadi ahli adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), notaris dan BPN

(Badan Pertanahan Nasional). Ketua majelis hakim Edward Harris Sinaga mengatakan, dari uang hasil *mark-up* Rp 2,2 miliar, hanya sekitar Rp 700 juta yang diketahui. Uang itu mengalir ke kantong terdakwa I Wayan Pageh selaku Kepala BP3TKI Denpasar,



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prio Adi Santoso dan Trusti Prio Sambodo (tersangka dalam berkas di Polda Bali).

Sisa Rp 1,5 miliar belum ada yang mengakui. Padahal, semua saksi termasuk kedua terdakwa menyatakan uang Rp 1,5 miliar diambil oleh Wahyu Matondang alias Dodik yang merupakan staf khusus Kepala BNP2TKI di Jakarta. Namun dalam sidang, Dodik berulang kali membantah pernah menerima uang tersebut. Sedangkan Pageh yang kemarin diperiksa sebagai terdakwa, mengaku hanya menerima uang hasil *mark-up* Rp 200 juta. Sementara terdakwa Prio mengaku hanya mendapat Rp 150 juta. Pengakuan Prio ini berbeda

dengan keterangan pemilik tanah, Paramartha dan Trusdi, yang mengatakan dirinya menerima Rp 450 juta.

Pihak ahli dari BPK yang dihadirkan kemarin mengatakan sempat melakukan investigasi pengadaan lahan tersebut. Kala itu, BPK menemukan kerugian negara Rp 2,2 miliar. Namun, BPK juga menyatakan tidak bisa menelusuri uang Rp 1,5 miliar yang diserahkan ke Dodik. "Kami juga buntu di Dodik karena dia mengaku tidak pernah terima uang tersebut," ujar ahli dari BPK ini.

Selain mengalir ke kantong tiga pejabat BP3TKI Denpasar, uang hasil *mark-up* diketahui mengalir ke seluruh staf kan-



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

tor BP3TKI yang dibagikan oleh Kepala BP3TKI Denpasar Pageh. Selain itu, Notaris Putu Candra juga mengaku menerima uang Rp 67 juta dari BP3TKI Denpasar. Notaris Candra yang mengaku uang tersebut merupakan pembayaran pengurusan jual-beli tanah seluas 4,5 are untuk kantor BP3TKI di Jalan Danau Tempe, Denpasar. "Uang Rp 67 juta itu diantar pemilik tanah (Paramartha - red) ke kantor dan diterima staf saya," jelas Candra. (kmb37)



Soal Pencairan Hibah

Pemprov Segera Koordinasi dengan Kemenkum HAM

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali hingga saat ini masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pencairan dana hibah. Sebelumnya, Pemprov telah mengajukan produk hukum berupa Peraturan Gubernur. Praktis, dana hibah masih belum ada yang cair di Bali.

"Belum, kan masih di sana maka ada saran lagi dari KPK agar mendapatkan kajian dari Kemenkum HAM. Memang betul, dia yang buat, sekarang kan harus minta-persetujuan beliau juga sehingga aman semua," ujar Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, usai Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Gedung Wiswa Sabha, Rabu (28/10) kemarin.

Sudikerta menegaskan, pemberian bantuan hibah harus sesuai dengan reg-

ulasi yang berlaku. Bila tidak, pihaknya khawatir akan menjadi temuan penegak hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi pula dengan Kemenkum HAM sesuai saran KPK. Masyarakat diminta bersabar lantaran proses ini memerlukan waktu yang panjang.

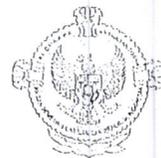
"Kita juga tidak mau memberikan bantuan hibah kepada masyarakat di kemudian hari menuai dampak hukum. Kalau itu terjadi, berapa masyarakat kita yang akan kena kasus hukum. Oleh karena itu, mari kita berproses memberi bantuan itu sesuai dengan regulasi, aturan-aturan dan prosedur yang mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dari dampak hukum terhadap masyarakat kita maupun kepada si pemberi dalam hal ini pemerintah," jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Bali, tercatat 102 desa pakraman di sembilan kabupaten/kota yang semestinya menerima dana hibah masing-masing Rp 200 juta. Seluruh desa telah menyetor laporan pertanggungjawaban hibah sebelumnya. Proses pencairan dana hibah terhambat lantaran terbentur Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang itu, hibah hanya bisa diberikan kepada lembaga organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan desa adat, desa pakraman, subak, sekaa, serta panitia pembangunan terkait kebudayaan tidak ada yang berbadan hukum. Padahal, bantuan hibah kepada desa pakraman khususnya, terkait dengan benteng kebudayaan Bali. (kmb32)

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 7

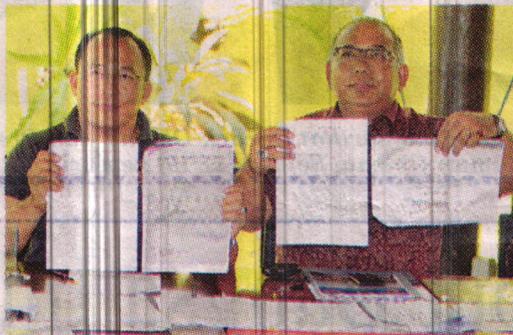


Terkait Reklamasi Teluk Benoa

Surat FSM dan Parasparos Dipalsukan

Denpasar
(Bali Post) –

Kekuatan kelompok-kelompok tertentu untuk menggolkan rencana reklamasi di Teluk Benoa, terus dilakukan. Sayangnya, cara yang dilakukannya terkadang menggunakan cara-cara yang tidak sepatasnya. Seperti memalsukan nama dan lambang organisasi yang resmi. Buktinya, surat Forum Studi Majapahit (FSM) dan Parasparos sudah dipalsukan. Tujuannya



Bali Post/eka

DIPALSUKAN - Ketua Forum Studi Majapahit, Made Suryawan dan A.A. Suryawan Wiranatha dari Parasparos, Selasa (27/10) kemarin menunjukkan kopian dokumen yang diduga dipalsukan.

untuk menggolkan rencana besar dari investor.

Ketua Forum Studi Majapahit Ir. Made Suryawan, M.M., CHA. dan Ketua Parasparos Ir. Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D. menyatakan keprihatinannya. Mereka mengaku resah dan gusar terkait adanya pemalsuan surat yang mengatasnamakan Forum Studi Majapahit dan Parasparos. "Kami sangat prihatin," ujar kedua tokoh yang *concern* menolak reklamasi ini, Selasa (27/10) kemarin.

Suryawan khawatir, kasus seperti ini bukan saja dialami organisasinya saja, bisa jadi organisasi lain bernasib sama. Karena itu, pihaknya hadir untuk menyatukan langkah, membuktikan soliditasnya, serta komitmennya tetap sama, yakni menolak reklamasi. "Kami merasa terusik dengan surat palsu yang mengatasnamakan organisasi kami," ujarnya dalam jumpa pers yang dihadiri para tokoh Bali lainnya, di antaranya Prof. Ketut Rahyuda (Forum Love Bali), I.B. Adnyana (Cakrawayu), Nyoman Mardika (ForBALI), Drs. A.A. Made Arwata, MSP., sejumlah aktivis dari KMHDI serta beberapa organisasi yang menolak reklamasi di Teluk Benoa.

Suryawan mengatakan, terungkapnya dugaan pemalsuan surat ini, tidak terlepas dari informasi yang diterimanya dari rekan-rekannya yang sepaham di pusat. "Mereka sempat mempertanyakan komitmen kami terkait dengan reklamasi ini. Ini mungkin sudah kehendak alam, sehingga kami mengetahui ada dugaan pemalsuan ini. Sikap kami tetap konsisten menolak. Pemalsuan surat ini, kami seolah-olah mendukung. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan kelompok tak punya jati diri, suka bohong, dan sebagainya," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Agung Suryawan Wiranatha. Dikatakannya, sudah sempat bersurat kepada Presiden dan ditembuskan kepada instansi terkait lainnya pada 17 Maret 2015 lalu. Surat itu isinya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Terkait pemalsuan dukungan, ia menyebutkan surat mendukung reklamasi tersebut banyak yang janggal. Misalnya, tanda tangan dirinya tidak sama. Logo organisasi juga berbeda. Mereka menggunakan stempel yang berbeda. Surat yang palsu itu dikirim ke kementerian dan juga ditembuskan ke LAPOR (layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat), per 7 September 2015 lalu. "Beruntung, pihak LAPOR melakukan klarifikasi ke *email* saya, sehingga kami tahu ada pemalsuan ini," ujarnya. (kmb12)

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 2